

DAMPAK SOSIAL BENCANA LUMPUR LAPINDO DAN PENANGANANNYA DI
DESA RENOKENONGO

(studi tentang penanganan Ganti Rugi Warga Desa Renokenongo)

SKRIPSI



Oleh :

CISILIA ANDRIANI

0641010010

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2011

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana atas ridho dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul **"Dampak Sosial Bencana Lumpur Lapindo dan Penanganannya di Desa Renokenongo"**. Di dalam penyusunan proposal ini, penulis berusaha semaksimal mungkin agar proposal ini memberikan manfaat yang banyak kepada para pembaca. Akan tetapi sebagai penulis tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Slamet Srijono, MSi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian Proposal. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Lukman Arif, MSi selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
3. Ibu Dra. Diana Hertati, MSi selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak / Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Para Penduduk dan Bapak Lurah di Desa Renokenongo.
6. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung penulis dalam segala hal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Dampak social.....	15
2.2.2 pengertian kebijakan.....	17
2.2.1 Komponen-komponen Kebijakan.....	17
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kebijakan.....	18
2.2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2.2.4 Pengertian Implementasi.....	20
2.2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	20
2.2.5.1 Tujuan Implementasi Kebijakan.....	20
2.2.5.2 Tahap Pelaksanaan Kebijakan.....	21
2.2.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan dan Implementasi.....	22
2.2.6 Prospek Memperbaiki Implementasi.....	22
2.2.7 Pengertian Sosialisasi.....	24

2.2.8	Fungsi Sosialisasi.....	26
2.2.9	Macam-macam Sosialisasi.....	26
2.2.10	Ganti Rugi.....	28
2.2.11	Lumpur Lapindo.....	29
2.2.12	Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Lumpur Lapindo.....	30
2.3	Kerangka Berfikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Fokus Penelitian.....	36
3.3	Lokasi Penelitian.....	36
3.4	Sumber Data.....	37
3.5	Pengumpulan Data.....	38
3.6	Analisis Data.....	39
3.7	Keabsahan Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum objek Penelitian dan Penyajian Data.....	43
4.1.1	Gambaran Umum Desa Renokenongo.....	43
4.1.2	Struktur Organisasi.....	45
4.1.3	Gambaran Umum semburan Lumpur Lapindo.....	48
4.2	Penyajian Data.....	50
4.2.1	penanganan masalah social.....	50
4.2.2	Pembayaran Ganti Rugi.....	62

4.3	Pembahasan.....	66
4.3.1	Penanganan masalah sosial	66
4.3.2	Pembayaran ganti rugi.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.....	76
Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

CISILIA ANDRIANI, DAMPAK SOSIAL BENCANA LUMPUR LAPINDO DAN PENANGANANNYA DI DESA RENOKENONGO, Skripsi, 2011

Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) yang dibentuk untuk menangani masalah Lapindo ternyata tidak cukup tuntas menyelesaikan masalah social akibat semburan Lumpur Lapindo di daerah Renokenongo kecamatan Porong-Sidoarjo.

Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui kualitas pelayanan dan penanganan korban Lumpur Lapindo di desa Renokenongo Kecamatan Porong-Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara snowball. Focus penelitian ini yaitu penanganan masalah social dan pembayaran secara bertahap yang menuju pada terpenuhinya ganti rugi.

Hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian ini adalah bahwa penanganan korban Lumpur Lapindo di desa Renokenongo Kecamatan Porong-Sidoarjo masih kurang baik dari segi social tidak ada penanganan dari pemerintah melalui BPLS baik dari segi penggantian mata penchariandan bantuan-bantuan terhadap korban Lumpur Lapindo, sedangkan masalah ganti rugi hanya 20% di awal dan 80% di cicil itupun tidak sesuai dengan perjanjian dan sering terjadi keterlambatan pembayaran. Dari sini saja sudah sangat terlihat bahwa semua pihak terasa saling angkat tangan melempar tanggung jawab.

Dengan adanya bencana Lumpur Lapindo banyak yang sulit untuk mencari mata pencharian untuk menghidupi dirinya sendiri. Dari segi pendidikan yang ada cukup dapat dikatakan lancar karena dalam setiap pendidikan di bantu dengan adanya BOS yang akan membantu pendidikan bagi korban Lumpur Lapindo.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau beberapa menyebut Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 26 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. (www.wikipedia.org) Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas menyatakan bahwa asal semburan itu dari. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur "kebetulan" terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Lokasi tersebut merupakan kawasan permukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri

utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, Indonesia. Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di 2 Jawa Timur. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah lumpur menggenangi dua belas desa di tiga kecamatan (sumber desa renokenongo). Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.

Menurut berbagai sumber data di lapangan, hingga saat ini jumlah bangunan yang terendam banjir lumpur panas meliputi 10.426 tempat tinggal, 33 sekolah dan 31 pabrik. Lahan sawah untuk tebu yang terendam mencapai 482,65 ha. Menurut kepala desa Banjir lumpur panas juga memaksa ratusan ribu warga kehilangan mata pencaharian dan mengalami nasib yang tak jelas. Aneh tapi nyata kebijakan pemerintah dan DPR terhadap masalah serius ini justru mengabaikan kepentingan korban.

Luapan lumpur lapindo juga berdampak secara langsung terhadap aktifitas masyarakat di sekitar semburan lumpur. Debit luapan lumpur yang cenderung mengalami peningkatan berakibat pada terendamnya beberapa desa atau kelurahan di sekitar semburan. Beberapa wilayah yang terendam, yaitu Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa Siring Kecamatan Porong, dan Desa Kedungbendo. Kemudian secara bertahap luapan lumpur terus menerjang ke wilayah Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (perumtas) 1, Desa Mindi Kecamatan Porong, Desa Besuki, Desa Kedungcangkring dan Desa Pajarakan Kecamatan Jabon, serta pada akhirnya diperkirakan akan mengancam seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dan daerah di sekitarnya.

Desa Renokenongo yang di kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebelumnya merupakan desa yang cukup tenteram, nyaman, serta masyarakat yang dinamis dengan tingkat perekonomian rata-rata tergolong mampu. Namun pada tanggal 29 Mei 2006, 2 hari setelah gempa besar mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya, lumpur panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 milik PT. Lapindo Brantas di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur mencapai 150.000 meter kubik setiap hari. Luas seluruh Desa Renokenongo adalah 195,4 Ha, dengan penduduk pada Tahun 2009 berjumlah 6.399 jiwa dan pada Tahun 2010 jumlah penduduk berjumlah 6.437 jiwa, dan terdiri dari 4 Dusun, terpaksa di ungsikan ke Relokasi mandiri yang bertempat di Perum.Renojoyo kedung klampir yang berjumlah \pm 500 KK. Karena terjadinya Lumpur, penduduk kehilangan tempat tinggal dan persawahan seluas 80,4 Ha. Hingga bulan Mei 2007 semburan lumpur ini belum berhasil dihentikan. Semburan lumpur panas ini tidak dapat dihentikan hingga menyebabkan

tertutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 80 hektar sawah serta pemukiman penduduk. Untuk permasalahan ganti rugi tercatat sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 di nyatatakan lunas. Akan tetapi pada tahun 2011 terhitung sejak bulan Januari-sekarang masih belum ada jawaban untuk permasalahan ganti rugi. Adapun bantuan untuk penanggulangan korban lapindo di Desa Renokenongo yaitu skema GKLL sebesar 10 juta, skema Bangunan susuk sebesar 5 juta, dan skema cash and carry sebesar 5 juta, dengan rincian ganti rugi meliputi tempat pengungsian, tanah sawah, tanah bangunan, kesehatan, dll.

Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Porong khususnya, ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan itu tertuju pada 3 Desa di Kecamatan Porong yang meliputi Desa Jatirejo, Desa Siring dan Desa Renokenongo. Perbedaannya adalah Desa Siring dan Desa Jatirejo sejauh ini masih ada beberapa aktivitas walaupun tidak berjalan secara optimal atau menyeluruh, termasuk untuk membayar ganti rugi warga yang tinggal di sembilan RT di kelurahan Siring dan Jatirejo bagian barat (Jawa Pos, 2011 : 37). Sementara itu, di Desa Renokenongo tidak ada aktivitas sama sekali dikarenakan telah lumpuh total (tenggelam) setelah terjadinya paska Lumpur Lapindo. Sehubungan dengan hal itu, Desa Renokenongo menarik untuk di jadikan obyek penelitian.

Untuk mengatasi fenomena Lapindo Sidoarjo, Kebijakan pemerintah terhadap korban lumpur lapindo diatur dalam peraturan presiden (perpres) No 14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa biaya masalah social kemasyarakatan di luar peta wilayah yang terkena dampak lumpur lapindo dibebankan kepada pemerintah. Sementara itu, Lapindo hanya menanggung ganti rugi untuk warga yang ada di dalam peta.

Sidoarjo (BPLS). Tapi peraturan presiden tersebut justru memihak PT. Lapindo. Misalnya, peraturan presiden ini hanya membatasi kewajiban dan tanggung jawab Lapindo pada peta terdampak sesuai dengan kondisi pada tahun 2007.

(sumber : Koran TEMPO, 22 Oktober 2009)

Padahal area yang terendam banjir lumpur panas terus meluas hingga kini. Akibatnya lebih dari 40 ribu jiwa yang lahan dan tempat tinggalnya terendam lumpur, dianggap sudah diluar tanggung jawab Lapindo karena area mereka berada diluar area peta dalam peraturan presiden tersebut. Peraturan presiden juga menetapkan pembayaran ganti rugi melalui mekanisme jual beli kepada korban dilakukan secara bertahap 20% uang ganti rugi dibayar di muka dan 80% sisanya dibayarkan kurang lebih setelah dua tahun. Hingga saat ini, proses pembayaran 80% sisa ganti rugi masih belum jelas peraturan presiden juga mengubah kewajiban Lapindo memberikan ganti rugi kepada korban menjadi masalah keperdataan jual beli tanah dengan harga yang ditentukan oleh Lapindo.

Warga korban Lapindo telah mengajukan uji material peraturan presiden No 14 Tahun 2007 tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) pada Januari 2008. Mereka menuntut agar peraturan presiden tersebut dibatalkan karena pembayaran ganti rugi kepada korban menggunakan proses jual beli secara tidak tunai. Cara ini sangat merugikan korban bahkan menguntungkan Lapindo. Namun mahkamah agung setali tiga uang dengan TP2LS-DPR RI dan pemerintah MA sejalan dengan pemerintah untuk menjaga kepentingan Lapindo. MA menolak pengajuan material peraturan presiden tersebut.

Dari fenomena diatas,terdapat juga fenomena khusus yaitu DPR yang seharusnya menjadi dewan perwakilan yang membela

kepentingan rakyat justru tidak berpihak pada rakyat, dalam hal ini pihak korban. Sejak awal tahun 2007, DPR telah mengancam akan melakukan hak interpelasi kepada pemerintah terkait pola penanganan Lumpur Lapindo. Namun hingga kini, ancaman hak interpelasi itu hanya gertak sambal alias omong kosong. Buktinya, TP2LS-DPR RI sepakat bahwa semburan Lumpur panas Lapindo merupakan bencana alam bukan akibat ulah tangan manusia kini jelas, TP2LS bentukan DPR tersebut bekerja untuk siapa,bukan untuk mengawasi penanggulangan Lumpur Sidoarjo oleh PT. Lapindo yang menyengsarakan rakyat tapi untuk memuaskan hawa nafsu pemerintah DPR dan Lapindo. Inilah wajah pemerintahan kita gambaran ini menguatkan keyakinan kita bahwa pemerintah sedang menjalankan system politik dan ekonomi kotor yang dikendalikan oleh para kapitalis sang pemilik modal. Keadilan bagi rakyat mampu diperjualbelikan dengan kapital yang dimiliki sang pemilik modal itulah trik dan intrik politik dan ekonomi neo kapitalisme. Alhasil tak ada keadilan sejati untuk rakyat.

(sumber : Koran Kompas, 2 Agustus 2009).

Dengan adanya fenomena seperti di atas, Pemerintah juga memberikan kebijakan bagi para korban Lumpur Lapindo karena Sudah tiga tahun lebih semburan Lumpur Lapindo muncul di Porong, Sidoarjo. Pemerintah telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus pidana Lapindo dan disusul munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Namun, kedua kebijakan itu

justru menjauhkan dari model penyelesaian secara adil dalam kasus Lumpur Lapindo.(sumber : Koran Jawa Pos, 23 November 2009)

Bagaimana tidak, dengan keluarnya kedua kebijakan itu, tanggung jawab penanganan Lumpur justru lebih banyak dibebankan kepada Pemerintah. Adapun pihak Lapindo hanya udampak pada 22 Maret 2007.

Kebijakan Pemerintah Dalam Peraturan Presiden No.40/2009 itu, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang berisikan tentang persoalan ganti rugi pun secara legal kembali direduksi menjadi jual-beli asset dan pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti yang disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak pada tanggal 4 Desember 2006, 20% di bayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 tahun habis. Peta area terdampak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran presiden ini. Kerugian warga karena menghirup udara beracun dan menggunakan air tercemar sejak muncul semburan Lumpur Lapindo tiga tahun yang lalu tetapi tidak pernah dianggap penting oleh pemerintah. Padahal warga porong adalah warga Negara Indonesia yang sah, mereka pantas mendapat perlindungan dari Negara.

Dari kebijakan di atas, Pemerintah juga memberikan kebijakan untuk korban Lumpur Lapindo itu sendiri adalah memberikan tempat tinggal bagi para masyarakat yang telah di sediakan oleh PT. Lapindo itu sendiri yang berada di Relokasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan No. 14 Tahun 2007 tentang masalah social yaitu tentang masalah tentang Pengelolaan penanganan bantuan social berupa pemberian bantuan air bersih, pengadaan dapur

umum bagi 18 Desa yang terdampak bencana, pengadaan PPPK dan bantuan obat-obatan, pendidikan dan pelatihan teknis/ketrampilan.

Kebijakan pemerintah disebut sistematis karena kondisi ini justru lahir dari kebijakan pemerintah secara structural, yang secara nyata dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan di wilayah dekat rumah tinggal, dekat bangunan umum dan wilayah pabrik.

Dalam kebijakan tersebut terdapat fenomena tentang social yaitu masalah pendidikan, di dalam Desa Renokenongo terdapat pembentukan panitia bantuan koordinasi untuk para masyarakat yang terkena dampak Lumpur Lapindo yaitu berupa buku secara gratis. Para panitia juga memberikan bantuan tentang ketrampilan bagi para masyarakat yaitu memberikan pengarahan atau ilmu tentang kewirausahaan, agar para masyarakat juga biasa membuka wira usaha sendiri nantinya.

Namun di tengah kegelapan selalau terpancar seberkas sinar dari lilin kecil, tak terkecuali dalam kasus Lumpur Lapindo ini. ada secercah harapan pemerintah akan menyelesaikan kasus Lapindo secara lebih adil dalam masa jabatan presiden 2009-2014 demikian di jelaskan dalam debat calon presiden pada pemilu presiden yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji untuk meninjau ulang model penyelesaian kasus Lapindo selama ini.

Setidaknya ada dua hal yang perlu ditinjau ulang agar kasus Lapindo dapat diselesaikan secara lebih adil.

Pertama, pemerintah harus terlebih dulu berani meninjau ulang keyakinannya bahwa semburan Lumpur Lapindo disebabkan oleh bencana alam.

Secara ilmiah, keyakinan bahwa Lumpur Lapindo merupakan akibat bencana alam sebenarnya juga telah ditentang oleh mayoritas pakar geologi dan pertambangan internasional. Bahkan dokumen rahasia PT. Medco yang dipublikasikan oleh website Aljazera juga dengan jelas mengungkapkan bahwa semburan Lumpur di Sidoarjo berkaitan dengan aktivitas pengeboran. Peninjauan terhadap keyakinan bahwa semburan Lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam itu menjadi penting karena dari keyakinan tersebut telah lahir beberapa regulasi yang justru membebaskan secara perlahan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus itu. Padahal bebasnya korporasi yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus semburan Lumpur di Sidoarjo merupakan preseden buruk bagi pengelolaan industri tambang di Indonesia. Konsekuensi peninjauan ulang keyakinan tentang penyebab semburan Lumpur adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk juga mencabut SP3 kasus pidana Lapindo.

Kedua, pemerintah harus meninjau ulang berbagai regulasi yang mereduksi persoalan ganti rugi bagi korban Lumpur menjadi sekedar persoalan jual-beli aset korban Lumpur. Negara harus memasukkan persoalan kesehatan, pendidikan, dan rusaknya lingkungan hidup ke dalam skema ganti rugi. Jika kedua hal tersebut tidak ditinjau ulang, apapun model penyelesaian kasus Lapindo dipastikan tidak akan bisa memenuhi rasa keadilan korban Lumpur, bahkan akan menjadi insiden buruk bagi penyelesaian kecelakaan industri ke depannya. Bila itu terjadi, sudah dapat dipastikan pula bahwa pemerintah SBY jilid II ini akan ke hal ini sesuai dengan ketentuan.

Tidak hanya itu, sejumlah catatan muncul pada proses penanganan dan penanggulangan Lumpur. Mulai dari teridentifikasinya pelanggaran hak asasi

manusia (HAM), tidak layak nya kondisi pengungsian, kondisi tanggul yang tidak permanen dengan mengandalkan bautan lapisan pasir dan batu seolah ‘menari’ di atas soft soil lumpur yang dapat tergelincir suatu saat, sampai pada lambatnya pembayaran ganti rugi. Fakta lain yang justru tidak pernah terangkat adalah soal perusakan dan kejahatan lingkungan secara sistematis.

Setelah kurang lebih 18 bulan, Rakyat Porong yang menjadi korban Lumpur tidak juga mendapatkan keadilan. Apa yang menimpa Korban Lumpur yang berada di pengungsian Pasar Baru Porong menjadi contoh. Hak-hak dasar berupa hak atas perumahan, kesehatan, pendidikan, kehidupan yang layak dan masa depan diabaikan. Selain itu dalam proses ganti rugi masih menimbulkan permasalahan. Pada waktu awal adalah standart harga tanah dan jumlah yang akan dibayarkan. Namun ada hal lain yang lebih stabil, yaitu masalah kepemilikan.

Pihak Lapindo akan membayarkan uang ganti rugi dengan syarat menyerahkan akta tanah atau dokumen-dokumen yang bisa menjelaskan kepemilikan tanah. Sehingga ganti rugi tersebut menjadi transaksi jual beli, bukan murni ganti rugi atas rusaknya tanah karena Lumpur. Dalam kasus Lumpur Lapindo terlihat jelas bahwa pemerintah bertindak inkonsistensi. Jadi segala dampak buruk yang terjadi pada kasus Lumpur Porong, baik terhadap orang ataupun pada Lingkungan Hidup sekitarnya yang terkena menjadi tanggung jawab pihak Lapindo. Dengan pemerintah mengeluarkan biaya yang dibebankan pada APBN, pemerintah sendiri telah mengingkari aturan yang ada dalam Undang-Undang 23/97 dan mengalihkan beban tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggungan PT. Lapindo Brantas.

Selain itu, luapan lumpur panas yang semakin tak terkendali ini mengganggu arus transportasi kereta api dari arah Surabaya ke arah timur serta menyebabkan jalan tol Surabaya-Gempol ditutup. Pada Tahun 2008 Desa Renokenongo dinyatakan lumpuh total karena terendam Lumpur.

Dalam hal ini, tidak luput dari adanya konflik antar penduduk setelah terjadinya Lumpur Lapindo, dimana Konflik merupakan suatu usaha social yang sering muncul dan mengiringi dalam setiap peradaban manusia. Manusia tidak akan terhindar dari konflik dengan segala atribut dan kreativitasnya dalam masyarakat, sebab dalam masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan social (social relation) yang masing-masing individu maupun kelompok saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konflik muncul ketika tujuan individu atau kelompok tidak sejalan, sehingga dalam konflik selalu terjadi ketidak seimbangan diantara hubungan-hubungan tersebut. Hubungan social mengalami suatu pertentangan, dari tingkat mikro antar individu hingga meluas ke tingkat yang lebih makro, yaitu kelompok, organisasi, masyarakat, dan Negara. Masing-masing kelompok saling berkaitan, membentuk sebuah mata rantai yang memiliki potensi kekuatan yang menghendaki terjadinya suatu perubahan, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Kelompok yang merasa telah dirugikan akan berusaha untuk menyalahkan kelas atau kelompok lain yang dinilai sebagai penyebab dari kerugian mereka.

Konflik juga dapat terjadi ketika keinginan manusia atau kelompok untuk berusaha menguasai sumber-sumber serta posisi yang langka (resource and position scarcity).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul ” Dampak Sosial Bencana Lumpur Lapindo Dan Penanganannya Di Desa Renokenongo

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut : Bagaimana Dampak social bencana Lumpur Lapindo dalam penanganan lumpur Lapindo di Desa Renokenongo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Implementasi Penanganan Korban Lumpur Lapindo di Desa Reno Kenongo Kecamatan Porong Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penanganan Korban Lapindo Di Desa Reno Kenongo Kecamatan Porong Sidoarjo.

b. Bagi Universitas

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh